



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS TERBUKA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **PAKEN PANDIANGAN**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG SISTEM INFORMASI DAN KEMAHASISWAAN**
3. NHK : **638211**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.970.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 95 m2/95 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 530.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/112 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
7. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
8. Tanah Seluas 1068 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 187.600.000**

1. MOTOR, BEAT SPORTY CW Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 7.600.000
2. MOBIL, TOYOYA KIJANG INOVA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 225.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	37.836.077
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.420.436.077
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.420.436.077

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.